

**PERAN TEUNGKU ABDULLAH UJONG RIMBA SEBAGAI SYUKO
HOIN (MAHKAMAH SYARI'AH) MASA PENDUDUKAN JEPANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

YULIA

Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora

Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam

Nim : 511202730



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

JURUSAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM

BANDA ACEH

2016

**Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Humaniora**

Oleh

YULIA

NIM. 511202730

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora
Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Drs. Anwar Daud, M.Hum
Nip. 196212311991011002

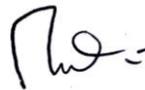
Pembimbing II



Asmanidar, M.A
Nip. 19771231200702001

Mengetahui

Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam



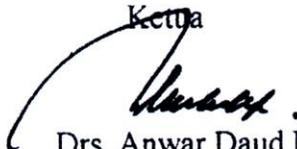
Marduati, M.A
NIP. 197310162006942001

Telah dimunaqasyahkan oleh Panitia ujian Akhir Program
Sarjana Stata Satu (S1) Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dan
telah dinilai sebagai salah satu beban studi untuk
Mencapai Gelar Sarjana dalam Ilmu Sejarah
dan Kebudayaan Islam

Pada tanggal
9 September 2016 M

Di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Akhir Program Sarjana (S1)

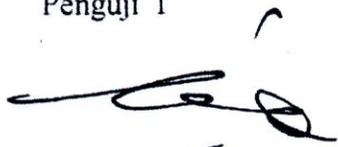
Ketua


Drs. Anwar Daud, M.Hum.
Nip.196212311991011002

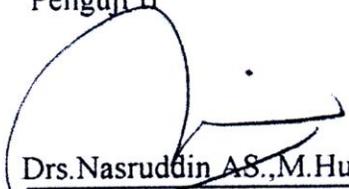
Sekretaris


Asmanidar, M.A
Nip. 19771231200702001

Penguji I


Drs. Husaini Husda, M.Pd.
Nip.196404251991011001

Penguji II


Drs. Nasruddin AS., M.Hum
Nip.1962122151993031002

Mengetahui

~~Dekan Fakultas Adab dan Humaniora~~
~~UIN Ar-Raniry, Darussalam- Banda Aceh~~




Nasruddin, M.A., Ph.D
Nip.197001011997031005

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat kepada semesta alam, sehingga dengan inayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Peran Teungku Abdullah Ujong Rimba sebagai Syuko Hoin (Mahkamah Syariah) masa Pendudukan Jepang**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Humaniora pada Fakultas Adab UIN Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh. Selawat beiringan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW salah seorang revolusi yang gigih berjuang menyuarakan kebenaran dihamparan belahan dunia.

Akhirnya penyusun Skripsi ini dapat diselesaikan, tidak lain karena berkat bimbingan dan arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Drs.AnwarDaud M. Hum. Dan ibu Asmanidar, MA, selaku pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu dan sumbangan pemikiran semenjak penulisan sampai selesainya karya ilmiah ini (Skripsi). Ucapan terimakasih kepada Bapak Dekan Fakultas Adab, Ketua Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam beserta staf- stafnya, para dosen pengasuh mata kuliah, Kepala Pustaka beserta staf-stafnya yang telah memberikan pelayanan maksimal terhadap peminjaman buku yang penulis butuhkan, serta rekan mahasiswa Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam yang telah memberikan spirit dalam penyelesaian skripsi ini.

Selain itu juga secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibunda tercinta, yang telah mendorong dan mendoakan setiap langkah perjuangan penulis untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Humaniora. Tidak lupa penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan yang senantiasa berdiskusi untuk memberikan masukan dan pencerahan bagi penulis sendiri.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa isi skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca agar penulis skripsi ini lebih baik dan bermanfaat bagi masa akan datang.

Akhirul kalam, hanya kepada Allah jualah kita limpahkan semuanya.
Amin ya Rabbl'alam.

Banda Aceh, 4 Agustus 2016

yulia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
ABSTRAK	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. RumusanMasalah	4
C. TujuanPenelitian	4
D. ManfaatPenelitian	5
E. PenjelasanIstilah.....	5
F. TinjauanPustaka	6
G. MetodePenelitian.....	7
H. SistematikaPenulisan.....	9
BAB II : BIOGRAFI TEUNGKU ABDULLAH UJONG RIMBA	
A. Biografi Abdullah Ujong Rimba	11
B. Pendidikan	13
C. Karya–karya Teungku Abdullah Ujong Rimba dan Pengaruhnya	14
BAB III :KEBIJAKANTEUNGKU ABDULLAH UJONG RIMBA SEBAGAI ULAMA ACEH	
A. Kedudukan Teungku Abdullah Ujong Rimba Sebagai Ulama Aceh.....	20
B. Kiprah Teungku Abdullah Ujong Rimba dalam Masyarakat Aceh.....	23
C. Gerakan Teungku Abdullah Ujong Rimba dalam Bidang Sosial Politik Aceh Pasca Kemerdekaan	26
1. Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Aceh	26
2. Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA)	30
BAB IV :PERAN TEUNGKU ABDULLAH UJONG RIMBA SEBAGAI SYUKO HOIN PADA MAHKAMAH SYARIAH	
A. Peran Abdullah Ujong Rimba Dalam Menjabat Sebagai Mahkamah Syariah.....	33
B. Akhir kepemimpinan Teungku Abdullah Ujong Rimba	35

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran-Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan Dekan Fakultas Adab UIN Ar-Raniry tentang pengangkatan pembimbing skripsi Mahasiswa Fakultas Adab UIN Ar-Raniry
2. Daftar Riwayat Hidup
3. Lampiran dokumentasi

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Peran Teungku Abdullah Ujong Rimba sebagai Syuko Hoin (Mahkamah Syariah) masa Pendudukan Jepang”. Pada dasarnya, Abdullah Ujong Rimba dikenal sebagai seorang ulama Aceh keturunan Ulee Balang dari Peusangan Aceh Utara. Daerah kelahirannya di Ujong rimba kabupaten Pidie, Sigli. Pada masa pendudukan Jepang di Aceh Beliau mempunyai peranan penting dalam masyarakat Aceh pada masa pendudukan Jepang di Aceh. Di dunia pemerintahan juga tercatat pada masa Jepang di Aceh, Abdullah Ujong Rimba disertai tugas sebagai *Atjeh Syuko Hoin* (Mahkamah Tinggi Agama Daerah Istimewa Aceh). Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas tentang Peran Teungku Abdullah Ujong Rimba sebagai *Syuko Hoin* pada Mahkamah Syariah. Metode yang digunakan adalah metode historis, dengan langkah yang ditempuh melalui heuristik (mengumpulkan sumber), kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, Abdullah Ujong Rimba merupakan seorang ulama Aceh. Adapun peran beliau dalam masyarakat Aceh pada masa pendudukan Jepang, Abdullah Ujong Rimba menjabat sebagai Syuko Hoin (Mahkamah Tinggi Agama Islam) pada Mahkamah Syariah di Sigli. *Syuko Hoin* adalah Lembaga yang berhubungan dengan masalah agama. Tgk. Jakfar Siddiq sebagai ketua dalam badan ini dengan anggotanya Teungku Abdullah Ujong Rimba. Pada tanggal 1 Juli 1946, Abdullah Ujong Rimba diangkat menjadi ketua Mahkamah Syariah Kabupaten Pidie di Sigli, karier yang dicapai Abdullah Ujong Rimba di Pengadilan meningkat pesat, selanjutnya Abdullah Ujong Rimba diangkat sebagai ketua Pengadilan Agama/Mahkamah syariah Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh sampai pensiun.

Kata kunci : Peran, Abdullah Ujong Rimba, Syuko Hoin, Mahkamah Syari'ah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedatangan Bangsa Jepang ke Aceh Sekitar Abad ke-20 adalah dengan tujuan untuk membantu Indonesia. karena Aceh pada saat itu sedang dijajah oleh Belanda. Masyarakat Aceh sama dengan rakyat-rakyat lain yang terdapat di Indonesia pada masa itu, mereka benar-benar telah mengharapkan agar Bangsa Indonesia dalam waktu secepatnya memperoleh kemerdekaan. Jepang mendarat di Aceh pada tanggal 12 Maret 1942, yang pendaratannya dilakukan di tiga tempat, yaitu di Krueng Raya (Aceh Besar), Sabang dan Peureulak (Aceh Timur).¹ Sejak saat tentara Jepang mendarat di Aceh, mereka bersama rakyat terutama terus melakukan penyerangan terhadap Belanda. Sebagian tentara Belanda yang masih tinggal di Kuta Raja, Oleh Gosenso diberikan tugas untuk mempertahankan Pelabuhan Udara Lhok Nga.

Ketika menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda di Aceh, yaitu pada akhir tahun 1941 dan awal tahun 1942, kegiatan rakyat yang di koordinor oleh sebagian besar Ulama dan kaum Ulee Balang, semakin meningkatkan perjuangan baik dalam bentuk Fisik maupun dalam bentuk kegiatan politik misalnya dengan mengadakan rapat– rapat rahasia yang diadakan di rumah Teungku T. Nyak Arif di Lamyong pada bulan Desember 1941. Pada masa pendudukan Jepang di Aceh

¹ M. Joenoes Djamil, *Riwayat Barisan F'(Fujiwara kikan) di Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Pelatihan Ilmu –Ilmu Sosial, Aceh 1975), hlm. 4-5

yang berlangsung dalam waktu dua setengah tahun ternyata kehidupan masyarakat Aceh semakin bertambah sulit, sedangkan janji yang pernah mereka utarakan sama sekali tidak diindahkannya. Kehidupan rakyat Aceh secara ekonomi pada masa ini sangat menyedihkan.

Pada zaman itu kehidupan perdagangan mengalami kemerosotan, para pedagang pribumi atau bumiputra walaupun masih melakukan kegiatannya, namun usaha perdagangan semakin hari semakin menurun.² Daerah Aceh pada masa pendudukan Jepang masih tetap merupakan sebuah keresidenan, sebagaimana halnya di masa pendudukan Belanda. Struktur pemerintahan yang pernah dijalankan Belanda masih tetap diperlakukan dengan mengubah sebutannya dalam bahasa Jepang.

Lembaga yang berhubungan dengan masalah agama ialah pembentukan Mahkamah Agama (*Syuko Hoin*) yang bertugas dalam persoalan agama Tgk. Jakfar Siddiq ditunjuk sebagai ketua dalam bidang ini dengan anggotanya Teungku Abdullah Ujong Rimba, Tgk Muhammad Daud Beureueh, Tgk. H. Ahmad Hasballah Indrapuri, Tgk. Abdul Wahab Seulimuem, Tgk. Abdussalam dan Said Abubakar. Pada masa pemerintahan Jepang di Aceh Abdullah Ujong Rimba dipercayakan oleh Pemerintahan Jepang untuk menjabat sebagai Syuko Hoin (Mahkamah Tinggi Agama Daerah Aceh).

²Zakaria Ahmad, *Sejarah Perlawanan Aceh Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme*, (Yayasan Pena Banda Aceh, 2008), hlm . 105.

Kiprah Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba dalam organisasi dan politik di antaranya: beliau bergerak dalam Organisasi PUSA. Atas kegelisahannya dengan kondisi Negara Republik Indonesia, maka beliau bersama-sama dengan Teungku Muhammad Daud Beureu-eh bersama ulama-ulama lainnya mendirikan Negara Islam yang dinamakan Darul Islam dengan tentaranya yang bernama Tentara Islam Indonesia (TII). Akan tetapi pada tahun 1956 beliau kembali ke pangkuan Republik Indonesia.

Pada masa pendudukan Jepang di Aceh, Abdullah Ujong Rimba dipercayakan oleh Pemerintah Penduduk Asal Matahari Terbit tersebut menjabat sebagai Syuko Hoin (Mahkamah Tinggi Agama Daerah Aceh) kemudian setelah Jepang menyerah dan pulang ke negerinya, seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, mulai 1 Juli 1946, berdasarkan prestasi kerja dan profesionalismenya yang telah ditunjukkan sebelumnya, Abdullah Ujong Rimba di Angkat sebagai Ketua Mahkamah Syariah. Kedudukan Abdullah Ujong Rimba Sebagai Uleebalang berkenaan dengan gelar yang disandang oleh ayahnya.

Tgk. Hasyim penulis menyebutnya dengan teungku, seperti Ismail Yakub menulisnya dengan Teuku sebagai keturunan Uleebalang Keumangan³. Penulis demikian mengisyaratkan bahwa ada di antara penulis tersebut menggolongkan atau menisbahkan Abdullah Ujong Rimba dari keturunan Ulee Balang dan keturunan ulama. Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba adalah ulama yang

³Ismail Yakub, *Gambaran Pendidikan di Aceh Sesudah Perang Aceh-Belanda Sampai sekarang*, Dalam Ismail Suny (ed), *Bunga Rampai Tentang Aceh*, (Jakarta: Bhatara, 1980), hlm .349

sangat besar pengaruhnya dalam menentang ajaran Komunis. Dalam Bidang Politik Abdullah Ujong Rimba bersama Tgk. M. Daud Beureueh juga termasuk salah seorang Pendiri Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Akan tetapi dalam operasi organisasi perhimpunan ulama tersebut, ia hanya sebatas anggota yang tidak begitu aktif.

Abdullah Ujong Rimba lebih aktif di Partai Politik Islam Masyumi, kemudian menjadi Ketua Umum MUI Aceh hingga beberapa bulan menjelang akhir hidupnya (1965-1982).⁴ Jabatan terakhir disebutkan karena alasan kondisi kesehatan, pada tahun 1982 diserahkan kepada Ali Hajmy. Oleh karena itu, penelitian tentang Peran Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba sangat menarik dan penting dilanjutkan dalam penelitian yang berjudul **”PERAN TEUNGKU ABDULLAH UJONG RIMBA SEBAGAI SYUKO HOIN (MAKAMAH SYARI’AH) MASA PENDUDUKAN JEPANG“**.

B. Rumusan Masalah.

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Teungku Abdullah Ujong Rimba Sebagai Syuko Hoin pada masa pemerintahan Jepang ?

⁴ Tim Penulis IAIN Ar-raniry, *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh*, (Banda Aceh, Ar-raniry Press, 2008), hlm. 142

2. Apa saja kebijakan yang dilakukan Teungku Abdullah Ujong Rimba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan Peran Teungku Abdullah Ujong Rimba sebagai Syuko Hoin (Mahkamah Syariah) masa Pendudukan Jepang.
2. Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan Teungku Abdullah Ujong Rimba ketika menjabat sebagai Mahkamah Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat akademis: Penelitian ini diharapkan menjadi talaah ataupun bahan kajian di kampus serta menjadi sebuah kajian khazanah keilmuan yang dibutuhkan oleh kalangan akademis dan intelektual.
2. Manfaat praktis: Penelitian ini diharapkan menjadi media untuk mensosialisasikan tentang pentingnya Peran Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba .

E. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memahami karya ilmiah ini, maka penulis menjelaskan beberapa penjelasan istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Peran adalah : suatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.⁵ Jadi yang dimaksud peran disini yaitu pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memegang status atau kedudukan tertentu.
2. Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba adalah seorang Ulama Aceh yang punya pengaruh besar terhadap masyarakat Aceh pada masa pemerintahan Jepang di Aceh.
3. *Syuko Hoin* adalah Lembaga yang berhubungan dengan masalah agama, yaitu Mahkamah Tinggi Agama Daerah Aceh. Pada tanggal 1 Juli 1946, Abdullah Ujong Rimba diangkat menjadi ketua Mahkamah Syariah Kabupaten Pidie di Sigli, karier yang dicapai Abdullah Ujong Rimba di Pengadilan meningkat pesat, selanjutnya Abdullah Ujong Rimba diangkat sebagai ketua Pengadilan Agama/Mahkamah syariah Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh sampai pensiun.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini bukan satu-satunya yang menaruh perhatian terhadap peran Teungku Abdullah Ujong Rimba pada Masa Jepang. Ada beberapa buku yang menjelaskan tentang hal tersebut. Namun, dalam beberapa buku tersebut hanya berisi penjelasan secara umum tentang Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba. Belum ada buku yang khusus menjelaskan peran Teungku Haji Abdullah Ujong

⁵ Poerwadarmitra, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka, 2006), hlm . 870.

Rimba sebagai *Syuko Hoin* (Mahkamah Syariah) masa pendudukan Jepang. Di antara beberapa buku yang menulis tentang Abdullah Ujong Rimba yaitu :

Dalam buku *Sejarah Perlawanan Aceh Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme*, Zakaria Ahmad, penulis menjelaskan Tentang perlawanan terhadap Jepang. Akan tetapi tidak begitu jelas karena penulis langsung menjelaskan tentang hubungan Aceh dengan Jepang pada saat itu. Kemudian dalam buku Ali Hajsmay yang berjudul *Mujahidin Pejuang Kemerdekaan dan Pembangunan Tamadun Bangsa*. Buku ini menjelaskan tentang Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba di samping sebagai seorang ulama sekaligus sebagai seorang Teuku keturunan Uleebalang. Oleh karena itu putranya, Abdullah Ujong Rimba idealnya menurut tradisi berhak menyandang gelar keduanya. Menurut Ismail Yakub kedudukan Abdullah Ujong Rimba sebagai Uleebalang berkenaan dengan gelar yang disandang Ayahnya T. Hasyim menyebutnya dengan Teungku. Penulis tersebut menggolongkan Abdullah Ujong Rimba dari keturunan Uleebalang dan Ulama.

Ismail Muhammad Syah (selanjutnya di singkat dengan Ismuha) mengkaji mengenai pengertian ulama, riwayat pendidikan ulama, beberapa tokoh ulama, organisasi ulama, dan peran ulama dalam melawan penjajah Belanda di Aceh.⁶ Selain itu Ismuha juga mengkaji mengenai pembaharuan sistem pendidikan yang ditawarkan oleh Abdullah Ujong Rimba di Aceh. Hamdiyah A. Latief mengkaji mengenai Lembaga Ulama (khususnya mengenai Persatuan Ulama Seluruh Aceh

⁶ Ismuha, "Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah", dalam Taufik Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), hlm. 93- 98.

(PUSA) yang berdiri pada tahun 1939) yang berperan sangat besar dalam memperbaharui sistem pendidikan di Aceh.⁷

G. Metode Penelitian

Untuk membahas suatu permasalahan dalam penelitian ini dibutuhkan suatu metode. Metode merupakan suatu alat untuk mencapainya suatu tujuan penelitian, agar tercapainya penelitian tersebut, maka yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Metode historis/Metode Sejarah, yaitu penyelidikan yang mengaplikasikan pemecahan ilmiah terhadap perspektif historis suatu masalah.⁸ Adapun langkah-langkah metode Sejarah yaitu:

a) Heuristik (pengumpulan data).

Heuristik merupakan proses pengumpulan data atau sumber yang berupa dokumen-dokumen tertulis dan masa lampau yaitu sumber yang berhubungan langsung dengan Sejarah Ulama Aceh pada masa pemerintahan Jepang

b) Kritik sumber (verifikasi).

Kritik sumber merupakan proses melakukan pengujian terhadap otentisitas dan kredibilitas. Sumber-sumber yang berkaitan didapatkan berupa sumber primer, yaitu karyanya sendiri dan sumber sekunder berupa buku-buku yang sudah dipublikasikan. Dalam kajian ini penulis lebih

⁷ Hamdiyah A. Latief, *Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA): Its Contribution to Educational Reforms in Aceh*, Thesis, (Canada, montreal: Institut of Islamic Studies McGill University,1992).

⁸ Winarno Suracmad, *Dasar –Dasar dan Tehnik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, (CV. Tarsito: Bandung, 1970), hlm. 79

fokus pada kritik intern, yaitu menilai pada kebenaran informasi yang ada dalam dokumen. Sumber-sumber yang diperoleh diuji dan ditala'ah lebih mendalam sehingga sumber dapat dipastikan ke otentisitasnya. Sumber kritik intern yaitu untuk mengetahui kredibilitas dan kebenaran isi sumber tersebut.

c) Interpretasi (penafsiran).

Interpretasi atau penafsiran sejarah sering disebut dengan analisis Sejarah. Analisis itu sendiri berarti menguraikan. pada tahap ini penulis menafsirkan atau menganalisis sumber-sumber yang telah terhimpun agar melahirkan sejumlah fakta yang relevan dan mendekati objektivitas.

d) Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian Sejarah yang dilakukan untuk membuktikan fakta-fakta yang sudah ada menjadi sebuah penulisan sejarah maka dalam hal ini penulis akan menguraikan dengan melihat fakta historis yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Penulis berpedoman pada buku "Panduaan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) mahasiswa dan berpedoman translitrasi Arab-latin" yang dikeluarkan oleh UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2004.⁹

⁹ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 68.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi dalam lima bab, setiap bab terdiri atas sub-sub yang akan memuat informasi dari bab. Agar memudahkan pembaca dalam memahami isi dari tulisan ini maka penulis berusaha agar seluruh isinya menjadi sistematis mungkin dengan jalan setiap pokok pembahasan dibagi dalam empat bab, isi dari masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab satu, merupakan bab awal atau bab pendahuluan yang berisikan kerangka-kerangka penulisan, di antaranya latar belakang dan masalah yang akan dikaji, lalu tujuan penulisan. Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam membaca penulisan ini maka penulis melengkapinya dengan penjelasan istilah. Untuk melihat perbandingan penulis juga mencantumkan kerangka teori serta tinjauan pustaka, dan tidak lupa pula menulis metodologi penelitian agar pembaca semakin terarah dan yang terakhir Penulis juga menambahkan penjelasan tentang sistematika penulisan beserta pembahasannya.

Bab Dua, membahas secara mendalam tentang Biografi Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba, Latar Belakang Keluarga, Pendidikan, dan karya-karya Abdullah Ujong Rimba serta pengaruhnya.

Bab Tiga, membahas Kebijakan Teungku Abdullah Ujong Rimba sebagai Ulama Aceh, Kedudukan Teungku Abdullah Ujong Rimba sebagai Ulama Aceh, Kiprah Teungku Abdullah Ujong Rimba dalam masyarakat Aceh, kemudian Gerakan Teungku Abdullah Ujong Rimba dalam Bidang Politik.

Bab Empat, membahas secara mendalam tentang Peran Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba sebagai *Syuko Hoin* dalam menjabat sebagai Mahkamah Syariah, dan Akhir kepemimpinan Teungku Abdullah Ujong Rimba.

Bab Lima, merupakan bab terakhir dalam tulisan ini, dalam bab ini dijelaskan secara singkat dan padat hasil penjelasan dan uraian dari bab terdahulu dalam beberapa kesimpulan serta penulis juga memberikan saran ke arah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.

BAB II

BIOGRAFI TEUNGKU ABDULLAH UJONG RIMBA

A.Latar Belakang Keluarga

Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba dilahirkan di Ujong Rimba Kabupaten Pidie pada bulan Rabi'ul Awal 1328 H/1907 M¹⁰ Nama utamanya adalah Abdullah, sedangkan nama Teungku atau sering disingkat dengan Tgk. Teungku merupakan gelar atau penyebutan karena Abdullah Ujong Rimba merupakan salah seorang ulama. Di Aceh, seseorang diberikan Gelar Teungku, syaratnya yaitu pernah menyantri di pesantren dan mengabdikan kepada agama, baik sebagai khatib jum'at, imam, pemimpin doa, serta memimpin dayah.

Gelar Teungku terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu yang paling rendah disebut Teungku Meunasah, dan yang paling tinggi disebut Teungku Chik. Selanjutnya, nama Abdullah Ujong Rimba merupakan gelar yang diberikan masyarakat tempat kelahirannya, yaitu desa Ujong Rimba kabupaten Pidie, Sigli. Ayah Abdullah Ujong Rimba bernama Tgk. H. Hasyim. Mengenai gelar pada ayahnya, sebagian penulis menyebutkan bergelar Teungku, akan tetapi sebagian lain (seperti Ismail Yakub) menyebutnya bergelar Teuku, yaitu keturunan Uleebalang Keumangan.¹¹

¹⁰Abdullah Ujong Rimba, *Hakikat Islam*, (Banda Aceh: MUI Aceh, 1980), hlm. vi-vii.

¹¹Ismail Yakub, "Gambaran Pendidikan di Aceh Sesudah Perang Aceh Belanda sampai sekarang", dalam Ismail Suny (ed.), *Bunga Rampai tentang Aceh*, (Jakarta: Bharatara, 1980), hlm. 349.

Sebaliknya, Ali Hajmy menyangkal pendapat yang menyebutkan Abdullah Ujong Rimba bergelar Teuku atau keturunan bangsawan.¹² Akan tetapi berdasarkan penelitian di dalam karya Abdullah Ujong Rimba, Tgk . H. Hasyim merupakan seorang ulama (teungku) yang juga bergelar teuku, oleh karena itu, Abdullah Ujong Rimba putranya menyebut gelar keduanya dengan demikian pendapat Ismail Yakub dan Ali Hajsmy berhubungan. Selanjutnya ditegaskan bahwa Abdullah Ujong Rimba bergelar *teuku* yang bersifat *teungku*.

Hal ini karena Abdullah Ujong Rimba merupakan seorang ulama dan Abdullah Ujong Rimba lebih menyukai bergelar *teungku* karena gelar *teungku* merupakan gelar yang terhormat dan suri teladan yang baik di Aceh. Berdasarkan hal tersebut Abdullah Ujong Rimba adalah keturunan Uleebalang dan keturunan ulama. Selanjutnya untuk mendapat peningkatan pencerahan Abdullah Ujong Rimba pindah ke Dayah Krueng Kalee, di Siem (dipimpin oleh Teungku Hasan Krueng kalee), yang mengajarkan tarekat al-Haddadiyah. Pada tahun 1346 H, Abdullah Ujong Rimba berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan belajar selama tiga tahun di sana. Abdullah Ujong Rimba belajar kepada mursyid yang mengajarkan tarekat al-Haddadiyah (tarekat yang di ajarkan oleh Teungku Hasan Kreung Kalee di Siem), Aceh Besar.

Mengenai guru Abdullah Ujong Rimba penulis belum mendapatkan data-data lengkap, akan tetapi Abdullah Ujong Rimba ketika belajar di Mekah dari ulama tasawuf. Dan penulis juga tidak menemukan orang-orang yang

¹²Ali Hjsmy, Ulama Aceh: *Mujahid Pejuang kemerdekaan dan Penbanguna Tamadun Bangsa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 150.

berhubungan dengan Abdullah Ujong Rimba ketika ia belajar di Mekah. Selama di Mekah, Abdullah Ujong Rimba mendalami dasar-dasar ilmu Islam (yang sudah didapatkannya ketika ia kecil) dan mendalami ajaran Wahabiyah. Hal ini di karenakan masyarakat di Mekah menganut paham Wahabiyah, sehingga ia terpengaruh, paham tersebut (mengalahkan pendirian dan pengetahuan ajaran tasawufnya sebelumnya).

Kondisi ini menyebabkan Abdullah Ujong Rimba berperan ganda (*multi-parceted*) di dalam ajaran tasawuf. Perubahan pemikiran pada Abdullah Ujong Rimba tersebut bersifat wajar. Hal ini di karenakan pemikiran tasawuf yang berasal dari Mekah lebih murni dibandingkan dengan ajaran tasawuf yang berasal dari selain Mekah¹³.

B. Pendidikan

Abdullah Ujong Rimba mula-mula belajar pada orang tuanya, Teungku Haji Hasyim. Dari orang tuanya Ia mempelajari dasar-dasar bahasa Arab, pokok-pokok ajaran Islam, yaitu akidah dan fikih ibadah. Kemudian pada tahun 1336 H/1917 M (ketika ia berusia 10 tahun) ia melanjutkan pendidikannya di Dayah Ie Leubee Menasah Blang, Pidie. Di sini Abdullah Ujong Rimba memperdalam bahasa Arab, hukum Islam, fiqih, tafsir dan tasawuf.

Pada tahun 1341 H, dari Dayah Ie Leubeu ia pindah ke Dayah Lamsi, pusat pendidikan Islam yang dibina langsung oleh Teungku Panglima Polem

¹³ *Ibid.*, hlm. 148

Muhammad Daud, di Kabupaten Aceh Besar. di dayah yang terkenal ini, Abdullah Ujong Rimba memperdalam ilmu tafsir, hadis dan fiqih. Pada tahun 1344 H, Abdullah Ujong Rimba pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan melanjutkan studi. Ia bermukim di Mekkah selama tiga tahun dan dalam waktu yang lama itu, Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba menambahkan ilmu dalam berbagai bidang: tafsir, hadis, fiqih, sejarah, mantik, ilmu kalam, dan juga berguru pada mursyid tarekat al- Haddadiyah.¹⁴

Selain dari belajar, beliau menggunakan kesempatan tiga tahun di Saudi Arabia untuk mengadakan kontak dengan para ulama/pemimpin Islam dari Dunia Islam, terutama pada musim haji. Setelah kembali ke Aceh dalam tahun 1347 Hijriah, beliau mendirikan sebuah pusat pendidikan Islam, yaitu Dayah Ujong Rimba. Di dayah inilah ia mengembangkan ilmunya. Setahun kemudian, bersama-sama dengan Teungku Daud Beureueh mendirikan organisasi Jami'iyah Diniyah di Sigli, yang kemudian merupakan salah satu pusat pendidikan Islam terkenal di Aceh.

C. Karya–Karya Tulis Teungku Abdullah Ujong Rimba dan pengaruhnya

Sekalipun Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba mempunyai pengetahuan luas dalam bidang Agama Islam, namun ia tetap berpegang pada Mazhab Syafii. Dalam pada itu, Abdullah Ujong Rimba tidak berpendapat bahwa pintu ijtihad terbuka sepanjang zaman, tetapi tidak semua orang bisa menjadi mujtahid; syarat-

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 150.

syarat bagi seorang mujtahid banyak. Menurut Abdullah Ujong Rimba, tidaklah semua orang dapat mengambil hukum sendiri dari alquran dan al-Hadis, sekalipun dia pandai bahasa Arab, apalagi bagi mereka yang tidak pandai berbahasa Arab. Tentu tidak mungkin mengambil hukum dari terjemahan al-Quran dan al-Hadis.¹⁵

Sekalipun ia menganut tarekat al-Haddadiyah, namun Abdullah Ujong Rimba sama sekali tidak dapat membenarkan aliran-aliran kebatinan yang telah menyeleweng dari ajaran Islam. Abdullah Ujong Rimba menentang praktik-praktik tarekat yang bertujuan mencari uang dengan mengkultuskan diri sendiri supaya dianggap orang sebagai ulama keramat. Untuk memberantas aliran-aliran kebatinan dan praktik-praktik tarekat yang salah, ia telah mengarang tiga buah kitab, yakni:

Pertama *Kitab Salek Buta*, yang bertujuan memberantas aliran-aliran kebatinan yang berasal dari paham wahdatul wujud. Kedua *Kitab Ilmu Tharekat*, yang bertujuan memberi keterangan tentang tarekat yang benar dan tarekat yang salah. Ketiga *Kitab Hakikat Islam*, yang bertujuan menjelaskan ajaran Islam yang sebenarnya. bagi Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba, “tarekat” yaitu jalan mendekati diri kepada Allah, Maha Pencipta, dengan mengadakan “tertib zikir” yang tertentu, bukan jalan untuk menyesatkan orang dari hakikat Islam. Selain mengajar dan memimpin MUI Aceh, Abdullah Ujong Rimba juga aktif menulis dan seminar (lokakarya). Dalam hal menulis, ia menulis beberapa artikel yang dipublikasikan dan yang dipresentasikan dalam seminar-seminar. Pedoman

¹⁵ Ali Hajsmy, *Ulama Aceh Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangunan Tamadun Bangsa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), Hlm .149

penolak *Salik Buta* merupakan karyanya yang pertama diterbitkan dan dianggap sebagai karya monumentalnya. Karya ini berisikan pemikiran Abdullah Ujong Rimba yang berhubungan dengan syariat, tasawuf, tarekat, hakikat, dan ma'rifat.

Selain itu, ia juga mengungkapkan tarekat sufi, aliran tasawuf, dan berbagai jenis tarekat Islam, serta sejarah perkembangan tasawuf di Nusantara (terutama di Aceh yang merupakan asal perkembangannya ajaran tasawuf di Nusantara). Kemudian dalam buku ini, ia juga mengungkapkan ragam aliran tasawuf salik buta beserta ajaran praktik dan model dakwahnya (dalam bentuk syair).¹⁶ Karya Abdullah Ujong Rimba yang lain yaitu ilmu tarekat dan hakikat. Penulis menemukan karya tersebut terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk tulisan tangan (manuskrip) dengan huruf Arab-Jawi dan berbentuk cetak (huruf latin) yang diterbitkan oleh Majelis ulama islam indonesia (MUI) Aceh.

Bagian pertama karya ini, membahas latar belakang lahirnya aliran dan timbulnya perpecahan dalam Islam. Aliran (seperti syariat, tarekat, dan hakikat). Abdullah Ujong Rimba juga membahas tokoh-tokoh yang memiliki motivasi dalam mengembangkan karier dan kerja, sehingga dapat dibedakan antara tokoh yang termotivasi oleh agama, penjahat, perdagangan, politik, dan pendidikan. Dengan tokoh yang hanya termotivasi pada bidang akademik murni. Selain itu Abdullah Ujong Rimba juga membahas tentang hubungan Islam dalam manusia, serta hubungan Islam dengan perempuan.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 67.

Dalam pembahasannya tentang hubungan Islam dengan manusia, ia menjelaskan posisi manusia dan hubungan dengan Allah (sebagai penciptanya). Kemudian dalam pembahasan mengenai hubungan Islam dengan perempuan, ia membicarakan konsep gender dalam Islam yang ditinjau melalui perspektif sejarah pra-Islam, konsep ketidakadilan gender dan menolak terhadap sistim perbudakan dalam Islam, termasuk perbudakan pada kaum wanita. Akhir dari bahasan kedua Abdullah Ujong Rimba mengungkapkan mengenai tasawuf sebagai salah satu aliran dalam Islam, selain hal tersebut sumber lain yang berupa makalah yang berjudul Masalah Talqin dan Qunut (makalah ini disampaikan dalam musyawarah Alim Ulama Se-Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 21-26 November 1967)¹⁷.

Di dalam makalah tersebut, ia menjelaskan (berdasarkan sejumlah al-Hadist, meskipun yang disebut dhaif) bahwa Talqin diperbolehkan dalam Islam ketika sakratul maut. Talqin adalah upacara penguburan mayat yang tidak berlawanan dengan hukum Islam. Aktivitas tersebut bermaksud memberi perhatian, menghormati mayat, dan dengan talqin tersebut, diharapkan dapat menambah keimanan kepada umat (mengenai alam kubur). Adapun mengenai pembacaan qunut (membaca doa setelah ruku' pada rakaat kedua shalat shubuh), banyak ulama yang berbeda pendapat mengenai hal tersebut.

¹⁷Abdullah Ujong Rimba, "Masalah Talqin dan Qunut", *Keputusan Musyawarah Alim Ulama Sedaerah Provinsi Daerah Istimewa Atjeh*, (Banda Aceh: MUI Aceh, 21-26 November 1967), hlm. 19- 24

Menurut Abdullah Ujong Rimba hal itu merupakan *furu'iyah*, yang berarti tidak perlu dipermasalahkan. Selanjutnya, buku tersebut merupakan penjelasan mengenai perdebatan dalam masyarakat Aceh. Hal ini membuktikan bahwa Abdullah Ujong Rimba merupakan ulama yang merespon segala permasalahan umat. Artikel lain (yang diseminarkan dan dipublikasikan) yang berjudul *Sejarah Kerajaan Islam Pase*¹⁸ (makalah diseminarkan di Medan pada tahun 1967) berisi tentang sejarah masuk dan berkembangnya Agama Islam di Aceh yang bersumber dan berdasarkan pendekatan arkeologis, yaitu dengan mengkaji tulisan yang terdapat pada batu nisan kompleks makam raja-raja di daerah Pase, Kecamatan Blang Me, Geudong Pase, Aceh Utara.

Berdasarkan artikel tersebut, Abdullah Ujong Rimba mengemari sejarah dan arkeologi (meskipun tidak belajar secara formal). Berdasarkan tiga karya tulis tersebut, Abdullah Ujong Rimba adalah seorang ulama yang memberi perhatian besar pada ajaran tasawuf dan mengimplimentasi dalam kehidupan kesehariannya.

Abdullah Ujong Rimba mengakui terdapat perbedaan definisi diantara para ahli dalam mendefinisikan tasawuf, baik dalam memaknai secara *istilahi* (terminologis). Ulama tasawuf mengatakan *tasawuf* yang berasal dari kata *shafa-shafwah*, yang berarti bersih atau suci. Arti kata lain dihubungkan dengan keadaan ahli tasawuf yang memiliki jiwa dan raga yang bersih, baik lahir maupun batin. Kemudian ulama lain (ilmuan Islam secara umum) mengatakan bahwa *tasawuf*

¹⁸Abdullah Ujong Rimba, "*Sejarah Kerajaan Islam Pase*", dalam Majalah Dwi Bulanan Santunan, No. 10 tahun II, (Banda Aceh: Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Maret-April 1977), hlm. 22-23

berasal dari *shuffah*, yang berarti lembaga pendidikan (yang dibangun oleh Nabi terletak di samping masjid Nabi di daerah Madinah) yang menampung 300 orang, yang berasal dari penjuru dunia. Definisi tersebut yang digunakan oleh ahli tasawuf sebagai dasar untuk menetapkan makna *tasawuf*.

Berdasarkan uraian tersebut, Abdullah Ujong Rimba menyimpulkan *tasawuf* sebagai ilmu yang berguna untuk memperbaiki sifat dan sikap manusia. Kemudian, *tasawuf* juga berguna untuk membersihkan diri, baik secara lahir maupun batin untuk memperoleh keridhaan Allah.¹⁹ Hal ini merupakan dasar pemahaman ajaran tasawuf mengenai hubungan manusia dengan pencipta.

Selanjutnya Abdullah Ujong Rimba menjelaskan aspek-aspek yang terdapat pada ilmu tasawuf (seperti Tafsir, Hadis, Fiqih dan Nahwu), yaitu: *Mabadi-mabadi* ilmu tasawuf sebagai mana halnya lain-lain ilmu, terdiri dari sepuluh perkara: pertama *takrifnya*, bermacam-macam pendapat ulama sufi mengenai *takrif* ilmu tasawuf sebagaimana yang telah diuraikan. Kedua *maudhu'nya*, yaitu zat Allah SWT. Ketiga penciptanya yaitu Nabi Muhammad Saw. Setelah itu diserahkan kepada Ali bin Abu Thalib. Kemudian oleh Ali diterimakan kepada Hasan Basri.

Keempat namanya yaitu ilmu tasawuf. Kelima hukumnya yaitu wajib atas masing-masing *mukallaf* mengamalkannya. Keenam mengetahui masalah-masalahnya yaitu istilah-istilah dan perkataan-perkataan yang beredar diantara

¹⁹ Abdullah Ujong Rimba, *Ilmu Tarekat dan Hakikat* (Banda Aceh: MUI Daerah Istimewa Aceh, 1975), hlm. 30

ulama-ulama sufi. Ketujuh *fadhillahnya*, yaitu semulia-mulia ilmu secara mutlak. Keadelapan perbandingan dengan lain-lain ilmu yaitu setinggi-setinggi ilmu secara mutlak. Kesembilan faedahnya yaitu bersih lahir dan batin dari sifat-sifat yang kotor dan mengetahui Tuhan *Rabbal'alam*. Kesepuluh sumbernya yaitu dari kitab suci, sunnah Rasulullah saw, dan pendapat-pendapat ulama sufi dari ilmu *kasyaf*.²⁰

Dari kutipan diatas, definisi *tasawuf* dengan aspek-aspek ilmu tasawuf berhubungan satu sama lain. Akan tetapi definisi tersebut hanya mengungkapkan mengenai hubungan vertikal (hubungan antara manusia dengan Tuhannya). Berdasarkan aspek-aspek ilmu tasawuf tersebut, Abdullah Ujong Rimba berusaha mendisiplinkan masyarakat melalui ajaran tasawuf dengan menyebutkan sepuluh hal aspek-aspek ilmu tasawuf. Kesepuluh aspek disebutkan di atas menjadi bangunan keilmuan Tasawwuf yang diungkapkan oleh Abdullah Ujong Rimba.

Selain itu Abdullah Ujong Rimba merupakan seorang ulama yang tidak mementingkan duniawi, seperti kekayaan dan kenikmatan berlebihan dalam hidup, sehingga ia tidak memiliki harta (kecuali sebuah rumah yang terletak di pasar peunayong Banda Aceh). Oleh karena itu rumah peninggalannya diwariskan kepada keluarga dekatnya. Begitu juga dengan bangunan pengajian (*dayah*) yang terletak di Gampong Ujong Rimba, Tiro yang masih utuh.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 78

BAB III

KEBIJAKAN TEUNGKU ABDULLAH UJONG RIMBA SEBAGAI ULAMA ACEH

A.Kedudukan Abdullah Ujong Rimba sebagai Ulama Aceh

Peran ulama dalam memimpin masyarakat Aceh tidak hanya sebagai pemimpin Agama, tetapi juga sebagai pemimpin politik dan juga pemimpin perang ulama dalam berperang melawan penjajahan Belanda, para ulama memimpin di baris depan. Bahkan peran ulama sangat berpengaruh dalam menambah kekuatan perang untuk melawan Belanda di Aceh.²¹ Ketika Abdullah Ujong Rimba menjadi ulama, ia berbicara dan bersikap jujur dalam berbagai kondisi, hal ini karena ia berpendidikan, sehingga hal tersebut membuat ia berpretasi dan bermatabat. Selain itu, Abdullah Ujong Rimba juga mengajar mata kuliah Fiqh Mu'amalah di Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Menurut penuturan Sulaiman Ibrahim (salah satu mahasiswanya), ia menghubungkan materi kuliah dengan kenyataan atau realitas kekinian masyarakat. Di samping konsisten terhadap ajaran Syariat, Abdullah Ujong Rimba juga menyukai pada kajian seputaran ajaran tasawuf. Ia ingin menciptakan pembaharuan dalam masyarakat, yaitu pembaharuan yang tidak terlepas dari

²¹Misri A. Muchsin, *Dinamika Tasawuf di Aceh pada Abad Ke- 20 (Kajian Sejarah, Sosial Politik, dan Keagamaan)*, (Banda Aceh, Ar-Raniry Press- Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012), hlm. 9-11.

ajaran Syariat. Para ulama pada zaman kesultanan sampai zaman penjajahan (pada abad ke-19 dan awal Abad ke-20)²² Abdullah Ujong Rimba dikatakan sebagai pembaharu sistem pendidikan (melalui surat kabar *Ummul Qurra*) sikap hidup dan perjuangan Abdullah Ujong Rimba sebagai penganut tarekat al- Haddadiyah dan mengenai peran Abdullah Ujong Rimba sebagai ketua MUI Aceh. Pada penghujung tahun duapuluhan, Teungku Abdullah Ujong Rimba menerima *Ummul Qura* dari Ayah Hamid, yang di dalamnya membawa pesan- pesan agar Teungku Abdullah Ujong Rimba bersama para ulama lainnya bergerak untuk memperbaharui sistem pendidikan Islam di Aceh.

Dalam surat kabar *Ummul Qura* tersebut, Ayah Hamid menulis dengan huruf dan bahasa Arab antara baris-barisnya informasi tentang gerakan pembaharuan sistem pendidikan Islam di Timur Tengah, terutama di Mesir, sebagai langkah untuk memerdekakan kembali Dunia Islam dari penjajah Barat Nasrani. Pembaharuan sistem pendidikan Islam yang telah dimulai Tuanku Keumala, harus segera diikuti para ulama lainnya, bahkan harus ditingkatkan. Ayah Hamid menjelaskan, bahwa kalau kita tidak mungkin lagi bergerak lewat Partai Politik Syarikat Islam (SI) secara terang-terangan, kita harus mencari jalan lain. Salah satu jalan lain yang amat penting, yaitu jalan *pembaharuan sistem pendidikan Islam*, untuk membangkitkan dan meningkatkan kecerdasan serta kesadaran umat.

²²Ali Hajmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, (Jakarta: Beuna, 1983), hlm. 194-255.

Teungku Abdullah Ujong Rimba sendiri merasa kurang mampu melaksanakan “pesan Ayah Hamid tersebut”, itu di sebabkan karena beliau seorang ulama yang bukan pemimpin rakyat, maka surat kabar *Ummul Qura* yang membawa pesan pembaharuan sistem pendidikan Islam: disampaikan kepada Teungku Muhammad Daud Beureueh, seorang ulam yang memimpin rakyat.

Kemudian, Teungku Muhammad Daud Beureueh bersama para ulama lainnya, termasuk Teungku Abdullah Ujong Rimba, bergerak cepat melaksanakan pesan Ayah Hamid, yang sebenarnya juga telah menjadi cita-cita mereka. Hasilnya, dalam waktu yang relatif singkat berubahlah *dayah-dayah* menjadi madrasah-madrasah, yang bukan saja secara fisik yang berubah, tetapi juga sistem pendidikan dan kurikulumnya. Dengan demikian masuklah “ilmu umum” dan bahasa Inggris atau Belanda ke dalam Madrasah-madrasah di Aceh.

Mengenai lembaga ulama (khususnya mengenai Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang berdiri pada tahun 1939) yang berperan sangat besar dalam memperbaharui sistem pendidikan di Aceh.²³ Lembaga ulama, yaitu PUSA, *Madrasah Khairiyah*, *Muhammadiyah*, dan *Sumatra Thawalib* yang telah berperan sangat besar dalam memperbaharui paham ajaran Islam di dalam masyarakat Aceh. Abdullah Ujong Rimba merupakan perintis fatwa haram mengenai ajaran komunis dalam partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun

²³Hamdiyah A. Latief, *Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA): Its Contribution to Educational Reformsin Aceh, Thesis*, (Canada, Montreal: Institut of Islamic Studies McGill University, 1992). Hlm .12

1965.²⁴ Musyawarah Alim Ulama se-Daerah Istimewa Aceh di bawah pimpinan ulama besar Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba. Musyarawah antara lain mengeluarkan fatwa yang mengharamkan ajaran komunisme dan menyatakan bahwa para pengerak, pelopor dan pelaksana G-30-S (Gerakan 30 September) adalah “kafir harbi” yang wajib dibasmi dan diperangi.

Fatwa tersebut ditandatangani oleh Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba sebagai ketua Presidium Musyawarah dan para ulama peserta musyawarah lainnya . Jabatan yang diduduki oleh Abdullah Ujong Rimba pada bidang politik yaitu sebagai anggota DPA RI (1968-1973) dan anggota MPR utusan Golkar (1977-1982), sehingga pemerintah RI pernah menganugerahkan penghargaan Bintang Maha Putra Kelas III kepadanya.²⁵

B. Kiprah Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba dalam Masyarakat Aceh.

Abdullah Ujong Rimba merupakan ulama yang menjadi panutan, berpikiran maju, ulama yang berkemampuan tinggi, ramah, penuh hormat dan cinta ilmu. Dengan sifat-sifatnya tersebut ia bersama ulama lainnya dengan mudah memimpin dan mengembangkan organisasi MUI di Aceh ke arah yang lebih baik. Abdullah Ujong Rimba juga membangun beberapa pesantren dengan sistem pengajaran dan kurikulum yang modern (yang sesuai dengan apa yang diajarkan dan dikembangkan di pesantren dan sekolah-sekolah di negeri Islam

²⁴Ismuha, *Sejarah Ringkas MUI di Aceh*, (Banda Aceh: MUI Provinsi di Aceh, 1977). Hlm. 12.

²⁵Harun Nasution, et al., *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI., 1992/1993), hlm. 25-26.

lainnya). Pada saat itu, para siswa di Aceh mulai menggunakan ruang sebagai tempat belajar, kelas, bangku, kursi, dan papan tulis. Padahal, sebelumnya hanya mengenal sistem *halaqah*, yaitu cara murid duduk melingkar dan guru menyajikan materi (bentuk belajar mengajar yang berlangsung di dayah).²⁶

Pada sisi lain, membiarkan dan mengizinkan keseluruhan aktivitas Islam di bidang ibadah atau campur tangan dari pemerintahan kolonial merupakan suatu kekeliruan besar. Ibadah haji misalnya, yang di anggap sebagai ritual Islam murni ke Mekkah, pada hakikatnya telah terinspirasi modernisme dan arah Pan-Islamisme yang efektif, sebab di sana kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia dapat berinteraksi secara intens. Dari interaksi mereka telah memicu lahirnya gagasan-gagasan Islam modern dan revolusioner.²⁷ Pelaku haji dengan gagasan-gagasan modernis dan revolusioner dimaksudkan adalah seperti apa yang dialami dan dipraktikkan oleh Abdullah Ujong Rimba sendiri. Ia selanjutnya menebarkan dan menanamkan benih-benih pembaruan dalam masyarakat Aceh, seperti yang akan diungkapkan berikut.

Berkenaan dengan gagasan pembaruan sistem pendidikan di Aceh sebenarnya telah digagas oleh Tuanku Raja Keumala (seorang ulama bangsawan dan keturunan Sultan Aceh). Pendidikan di Aceh pada masa Jepang, sebagaimana di wilayah lain di Nusantara, berbeda dengan pendidikan yang diterapkan Belanda

²⁶*Ibid.*, Hlm. 169

²⁷Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen Di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 88

sebelumnya.²⁸ Jepang menerapkan pendidikan sesuai dengan kepentingan peperangan dan penduduknya. Namun demikian, satu kebijakan pemerintahan pendudukan Jepang terhadap kelangsungan pendidikan di Aceh tergolong bermakna positif, khususnya terhadap pendidikan dasar, yaitu berhasil menyeragamkan semua sekolah dasar sebagai Sekolah Negara atau Sekolah Negeri (*Kokumin Gakko*), dengan masa belajar selama enam tahun.

Dalam bidang tasawuf, Abdullah Ujong Rimba ingin mengembalikan pemahaman dan praktik ajaran Islam sesuai dengan syariat yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Usaha Abdullah Ujong Rimba untuk memurnikan dan memperbaharui ajaran Islam yang sesuai dengan syariat di Aceh menggunakan lembaga MUI sebagai sarana yang efektif untuk menyebarkan beberapa bukunya. Kemudian, ia melibatkan sejumlah ulama besar di Aceh untuk melahirkan fatwa yang berkaitan dengan permasalahan aqidah.

Menurut Abdullah Ujong Rimba, tasawuf yang berkembang dan dipraktikkan di Aceh pada abad XX umumnya ada hubungan kait mengkait dengan tasawuf abad XVI-XVII di samping yang berasal dari ajaran Syi'ah. Aliran tersebut merupakan kelanjutan ajaran tasawuf yang diajarkan dan dikembangkan oleh al- Fansuri, al- Sumatrani dan Sayf al-Rijal.²⁹ Berdasarkan perubahan-perubahan dalam praktik ajaran, tasawuf yang berkembang dalam abad

²⁸Misri A. Muchsin, *Potret Aceh Dalam Bingkai Sejarah*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 128

²⁹Abdullah Ujong Rimba, *Pedoman Penolak Salik Buta*, (Medan Deli: Syarikat Tapanuli, 1353/1932), hlm. 5

XX di Aceh telah bercorak aliran kebatinan dan melahirkan satu corak baru, yang disebutnya dengan salik buta.³⁰

Untuk menelusuri kebenaran yang diungkapkan Abdullah Ujong Rimba, maka sepatutnya dilacak sepintas tasawuf di Aceh pasca al-Singkili. Dalam hal ini al-Singkili, dapat dianggap ulama yang bertanggung jawab bagi berkembang tarekat-tarekat, terutama tarekat Syatariyah di Nusantara, sebab sebelum meninggal pada tahun 1105/1693, ia selaku mufti kerajaan Aceh telah memberi kebebasan berkembangnya tasawuf dengan berbagai jenis atau aliran tarekat. Untuk mengeksplorasi bagaimana perkembangan tasawuf, khususnya di Aceh setelah ulama ini meninggal, perlu dilihat kreativitas murid-muridnya, apakah ada yang dapat dibuktikan relasi keilmuan atau jaringan intelektual guru dengan muridnya secara tali-temali langsung.

Paham Wahdatul Wujud (Wujudiyah) yang dianut Hamazah Fansury dan Syamsuddin Sumatran, setelah wafat kedua beliau, telah berkembang sedemikian rupa yang makin lama makin menjauh dari keasliannya, sehingga akhirnya berubah menjadi berbagai berbagai “tharikat” yang sesat dan menyesatkan, yang dalam masyarakat Aceh kemudian terkenal dengan nama” SALEEK BUTA” atau dengan terjemahan bebasnya” Pengembara Buta”.

³⁰ Abdullah Ujong Rimba, *Hakikat Islam*, (Banda Aceh: MUI Aceh, 1980), hlm. 176

Lebih jauh Ali Hasjmy menyebutkan bahwa Salik Buta di samping perpanjangan tangan dari ajaran *wahdat al-Wujud* (Wujudiyah) dengan penyimpangan-penyimpangan dan “modifikasi” yang dilakukan pengikutnya, juga pencampuran dengan ajaran Syi’ah dari Syu’bah Ghaliyah (sekte keterlaluhan salah). Sekte terakhir menempatkan imam-imam mereka di luar batas kekuasaan makhluk, yaitu sebagai pancaran dari Khalik. Mereka memiliki ajaran dengan berpendapat bahwa Allah dapat menjelma dalam tubuh-tubuh imam-imam mereka, sehingga dengan imam bebas dari tugas makhluk yang lain dan malah dapat membebaskan pengikutnya dari tugas-tugas kemakhlukan. Ibadat mereka berbeda dengan manusia lain; apa yang halal pada orang lain haram pada mereka. Sebaliknya apa yang haram pada orang lain adalah halal pada diri mereka.³¹

Pengikut Salik Buta pada mulanya muncul berarti karena keawaman mereka tentang ajaran *wahdat al-Wujud*, walaupun sebenarnya seperti disebut Ali Hasjmy mereka masih murid langsung dari al-Sumatrani. Dari realitas yang disebutkan terakhir kemudian disebut dengan ajaran salik buta, karena tidak murni lagi dari ajaran *wahdat al-Wujud* yang diformulasi dan dikembangkan oleh al-Fansuri dan al-Sumatrani, baik karena pengurangan maupun penambahan ajaran karena keawaman penganutnya.

Sekte-sekte Salik Buta di Aceh yang muncul pasca al-Singkili sampai awal abad XX, misalnya ditemukan pada tiga sentral pengembangan dan

³¹ Ali Hajsmy, *Syah dan Ahlussunnah Saling Rebut Pengaruh dan Kekuasaan Sejak Awal Sejarah Islam di Kepulauan Nusantara*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1983), hlm. 56-57

pengajaran suluk di Aceh. Seperti disebutkan oleh Nouruzzaman Shiddiqi yaitu di Juluk (satu kecamatan di wilayah Aceh Timur sekarang), yang dipimpin oleh Ibrahim Juluk; di Teupin Raya (di kecamatan Simpang Tiga kabupaten Pidie) yang dipimpin oleh Tgk. Teureubue 'Id; dan Peulukung Jeuram, Aceh Barat, yang dipimpin Tgk. Mayuddin yang berjulukan Abu Peulukung atau Habib Muda Seunagan.

C. Gerakan Teungku Abdullah Ujong Rimba dalam Bidang Sosial Politik Pasca Kemerdekaan

1. Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Aceh.

Situasi perpolitikan Aceh pasca kemerdekaan, yang di fokuskan pada kasus Darul Islam (selanjutnya disingkat dengan DI/TII) merupakan hal-hal yang signifikan untuk dihubungkan dengan tema kajian. Kedua gerakan telah mengantarkan Aceh dalam kondisi tidak stabil dan berekor negatif sampai waktu terakhir ini. Dapat diasumsikan bahwa, imbas dari situasi semacam itu berpengaruh terhadap pemikiran seseorang, khususnya Abdullah Ujong Rimba yang hidup dalam rentang zaman tersebut. Sejarah sosial,³² dan sejarah politik masyarakat Aceh sebelum kedatangan Belanda ditandai dengan adanya tatanan kekuasaan kesultanan yang mapan, yaitu dengan sistem pemerintahan kerajaan monarkhi yang dianut.

³² Azyumardi Azra, *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci: Hijaz (Mekkah dan Madinah) 1800- 1925*, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 10.

Sultan selaku penguasa pemimpin penguasa tertinggi, dalam memimpin masyarakat yang terdiri dari berbagai lapisan dan profesi, dibantu oleh pemangku adat (Ulee Balang) yang bergelar Teungku dan pemangku agama atau ulama yang bergelar Teungku.³³ Sesuai dengan kepentingan politik pemerintah, masalah keagamaan mendapat perhatian dari pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam menghadapi para ulama telah di bentuk sebuah badan resmi yang dapat memberikan nasehat-nasehat kepada pemerintah di bidang agama, yang di namakan Majelis Agama Islam untuk bantuan kemakmuran Asia Timur Raya (MAIBKATRA) yang tidak bertentangan dengan agama Islam.

Dari pihak Ulee Balang tidak ada yang mewakili dalam badan ini, hal ini mungkin dianggap sebagai perimbangan politik, karena uleebalang telah diberikan jabatan sebagai pemerintah seperti *Gutyo* dan *Sontyo*. Lembaga yang berhubungan dengan masalah agama ialah pembentukan Mahkamah Agama (*syukyo hoin*) yang bertugas dalam persoalan Agama. Tgk. Jakfar Siddiq di tunjuk sebagai ketua dalam bidang ini dengan anggotanya Tgk. Muhammad Daud Beureueh, Tgk. H Ahmad Hasballah Indrapuri, Tgk. Abdul Wahab Seulimuem, Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba, Tgk . Abdulsalam dan Said Abubakar.

Pendirian dan tekad rakyat Aceh melawan penjajah, menurut hemat penulis tidak terlepas karena dilandasi pada keimanan dan jihad fisabilillah. Dengan prinsip inilah mereka bersungguh-sungguh dan berani mati dalam

³³A.J. Piekaar, *Aceh dan Peperangan dengan Jepang*, Terj. Aboe Bakar, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1998), hlm. 6

melawan penjajah. Dari cara bergerilya rakyat Aceh sebagai fase terakhir disebutkan, maka orang Belanda menyebutkan terhadap peperangan fase ini dengan *Atjeh Moorden*, atau peperangan yang nekat, beresiko tinggi, dan banyak jatuh korban.³⁴ Dalam hal perlawanan rakyat Aceh, sejak tahun 1896 pusat pemerintahan di Belanda diguncangkan dengan berita Teuku Umar, seorang Ulee Balang yang beberapa tahun terakhir telah berhasil ditarik oleh pemerintahan Hindia Belanda.

Akan tetapi sejak tahun ini ia telah membelot, sehingga telah menimbulkan kepanikan di negeri Belanda dan koran-koran menggambarkan keadaan di Aceh sangat gawat dan mengkhawatirkan pihak Belanda. Berdasarkan pemimpin perang yang terdiri dari kaum ulama itulah perang Aceh berlangsung lama, walaupun Sultan Tuanku Muhammad Daud Syah dan Panglima Polem selaku pemimpin militer utama telah menyerah pada tahun 1903.

Tgk. M. Nur El Ibrahimy. Menurutnya peristiwa yang menjadi problema nasional tersebut terjadi erat kaitannya dengan dan karena kecenderungan Jakarta yang manafik; dan para petinggi republik telah mengecewakan tokoh-ulama di Aceh. Hal itu dimaksudkan, ketika Presiden Soekarno berkunjung ke Aceh di awal revolusi, dalam pidatonya mengeluarkan statemen, yang menyebutkan “pancasila adalah milik kita. Ia adalah wadah yang kita isi.”³⁵ Jika kita isi dengan

³⁴R.A.Kern, *Atjeh Moorden*, Terj. Abubakar Aceh, *Pembunuhan Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1985).

Islam, maka islamlah negara kita”. Jika Ucapan presiden pertama dan ploklamator RI ini, tercatat lekat dalam benak serta menjadi pegangan umum bagi masyarakat Aceh, terutama para ulama dan pemimpin daerah ini.

Hanya saja kenyataannya, dalam waktu yang tidak lama berselang, Soekarno dengan nyata tidak konsisten dengan ucapannya sendiri. Hal itu diketahui dari satu pidatonya pada tempat yang berbeda, yaitu tempatnya di Amuntai, Kalimantan Selatan, ia mengatakan: “kalau Indonesia menjadi negara Islam, kita akan hancur berantakan “. Jadi menurutnya yang tepat, tidak lain kecuali harus didasar atas dasar kebansaan semata.³⁶

Seiring dengan terkuaknya informasi tentang dualisme pendirian-pemikiran Soekarno, maka di mata pemuka Aceh di samping muncul sikap tidak percaya, berkesimpulan pula bahwa jangankan presiden pertama ini bercita-cita untuk mewujudkan Negara Islam, dalam realitas NRI semakin hari bertambah nyata adanya para pemuka-pejabat negara ini mencoba membelot ke arah yang sesat. Kejaksaan Agung waktu itu, pernah melarang berkhotbah yang berisi politik di masjid dan di tempat-tempat praktik agama, padahal bagi rakyat Aceh hal itu merupakan bagian dari ajaran agama.

Islam dan Politik tidak dapat dipisahkan, dan malah menurut pemuka Aceh seperti Teungku Muhammad Daud Beureueh berpendirian, jika pidana Tuhan tidak berlaku, berarti menyimpang dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

³⁵ Herbert Feth & Lance Castles (ed.), *Pemikiran Politik Indonesia 1945 -1965*, (Jakarta: LP3ES , cet. II, 1995, hlm. 209.

³⁶ Tamar Djaya, *Soekarno Hatta Persamaan dan Perbedaan*, (Jakarta: Sastra Husada, 1981), hlm. 210.

Berkenaan dengan pendirian tokoh Aceh ini selengkapnya Castles menulisnya: kami telah jemu melihat perkembangan-perkembangan atas dasar Negara Republik Indonesia, betapa tidak, sejak dari dahulu kami berharap, bercita-cita negara berkisar atas dasar Islam, akan tetapi jangankan terwujud apa yang kami idam-idamkan, malahan sebaliknya semakin hari semakin tampak pada kami ada di antara pemuka-pemuka Indonesia mencoba membelok ke arah yang sesat.

Andaikan Undang-Undang Dasar R.I. sudah memberi jaminan Kemerdekaan beragama Islam, sudah lama pula dapat berjalan hukum-hukum agama di tanah Aceh, yang rakyatnya 100 persen beragama Islam. Malah oleh Kejaksaan Agung sendiri pernah mencoba mengeluarkan larangan berkhotbah di Mesjid atau di tempat-tempat lain yang katanya tempat agama, yang berisi politik, padahal bagi kami politik ialah sebagian dari agama yang kami anut.

Audrey R. Kahin berpendapat bahwa faktor terjadinya pemberontakan DI/TII di Aceh karena tokoh-tokoh revolusi Sosial di Aceh tidak diakui oleh presiden (katanya karena tidak menguasai bahasa Belanda dan tidak memiliki pengalaman yang sama dengan presiden).³⁷ M. Nur El Ibrahim (dalam Deliar Noer) menyebutkan alasan munculnya gerakan pemberontak yang dipimpin oleh Tgk. Muhammad Daud Beureueh, karena pemerintah pusat tidak memperhatikan

³⁷Audrey R. Kahin, *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, terj. Satyagraha Hoerip, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), hlm. 113

kepentingan daerah Aceh.³⁸ Pada tanggal 15 Maret 1959 Tgk. Muhammad Daud Beureueh menyerahkan kepemimpinan DI/TII kepada Husen al- Mujahid.

Setelah delapan tahun gerakan DI/TII menyebar di Aceh, terkait pula dengan konspirasi politik PRRI yang menginginkan Aceh kembali dan terus bergolak. keinginanya disalurkan melalui mantan pemuka DI/TII Aceh, Hasan Alie cs. Untuk mensikapi realitas yang tidak menguntungkan, maka pada 15 Maret 1959 berlangsunglah pengambil-alihan kekuasaan DI/TII yang dimotori oleh Gani Usman, Hasan Saleh, Husin Jusuf, Ishak Amin dan Amir Husein Al-Mujahid dari tangan Tgk. Muhammad Daud Beureueh.³⁹

Untuk mengantisipasi konflik yang berkepanjangan dan bertambah banyak jatuh korban, terutama di pihak rakyat sipil Aceh, serta ditambah DI/TII sulit dibasmi secara militer karena mendapat simpatisan luas dalam masyarakat Aceh, maka pemerintah pusat terpaksa mencari pendekatan dan strategi alternatif lain. Strategi lain yaitu pemerintah mengangkat perwira (yang berasal dari Aceh sebagai pemimpin militer tertinggi di Aceh, yaitu Syamaun Gaharu dan T. Hamzah untuk melaksanakan beberapa gagasan pemerintah yang kemudian melahirkan perjanjian yang disebut dengan *Ikrar Lam Teh*, serta mengadakan kongres rakyat Aceh.

³⁸ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945- 1965*, (Bandung: Mizan, cet. II ,2000), hlm. 356.

³⁹ Sjamaun Gaharu, *Panglima Daerah Militer 1/Iskandar Muda, Revolusi Belum Selesai! 17-8-1945 – 17-8-1960, Pidato Menyambut Hari Ulang Tahun RI*, (Banda Aceh: Kodam Iskandar Muda, 1960), hlm. 8-9

Pendekatan dan sekaligus strategi *kedua*, yaitu dengan memberikan kepada Aceh sebagai Daerah otonomi luas, khususnya dalam bidang keagamaan, pendidikan dan adat istiadat serta Aceh diwujudkan kembali sebagai satu provinsi Sumatra Utara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi-kondisi tidak menguntungkan, penuh ketidakpuasan dan merasa terkhanati yang disikapi oleh tokoh-tokoh aceh sejak tahun 1950-1964 telah mewarisi konflik berkepanjangan.

Konflik berlanjut sampai tahun–tahun berakhirnya Orde Lama dan awal Orde Baru dengan berbagai corak dan bentuk gejolaknya. Hal itu karena DI/TII yang dalam istilah T. Ibrahim Alfian sebagai Gerakan Darul Islam Aceh (GDIA),⁴⁰ atau istilah dari pemerintah RI di Jakarta disebut dengan Pemberontakan Daud Beureueh atau NBA (Negara Bagian Aceh), telah dapat dipadamkan dengan tindakan-tindakan dan strategi tersebut di atas.

Akan tetapi tokoh-tokoh DI/TII masih menjadi saksi sejarah dan sangat berpengaruh dalam masyarakat. Ucapan, tindakan dan pikiran mereka dapat menjadi “virus berbisa” dan menjadi “ polisi pengintai” dalam pelaksanaan pemerintahan, sehingga keberadaannya dapat menjadi latar munculnya gerakan dan konflik baru, seperti Gerakan Aceh Merdeka yang disingkat dengan AM atau GAM.

2. Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA)

⁴⁰ Teungku Ibrahim Alfian, “*Aceh Penyelesaian Masalah Gerakan Merdeka (GAM)*”, dengan Konsep Prinsip Bijaksana, makalah, (Yogyakarta, 17 April 2000), hlm. 3

Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), terbentuk berdasarkan hasil keputusan musyawarah ulama seluruh Aceh. Musyawarah dimaksud diadakan di kampus al-Muslim Peusangan Matang Glumpang Dua, Biruen Aceh Utara, pada 5 sampai 8 Mei 1939 atau bertepatan dengan memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, 12 Rabiul' Awwal 1358 H. Tujuan PUSA adalah untuk menyiarkan, menegakkan dan mempertahankan Islam sebagai agama yang suci. Tujuan lain adalah berusaha sedapat mungkin mempersatukan paham ulama Aceh dalam hal menerangkan hukum Islam untuk menghindari percekocokan dalam masyarakat.

Dengan berkuasanya Ulee Balang dibidang eksekutif dan kaum ulama dibidang legislatif, terjadilah adu kekuatan dengan menggunakan kekuasaan masing-masing untuk melumpuhkan lawanya.⁴¹ Selanjutnya, PUSA bertujuan memperbaiki dan menyatukan program pengajaran yang beraneka ragam pada sekolah-sekolah agama seluruh Aceh. Sebagai organisasi yang lahir dan didirikan oleh putera Aceh dan memiliki Prototype yang menyesuaikan dengan mentalitas dan tuntutan sosial politik Aceh, PUSA dibangun dan dipimpin oleh ulama yang berhaluan modernis terkemuka di Aceh.

Eksistensi PUSA dalam peredaran sejarah bertambah menyakinkan masyarakat dengan adanya perjalanan keliling sebagai langkah sosialisasi program dari pimpinanya seperti Tgk. Muhammad Daud Beureueh yang terkenal

⁴¹Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak: Bertarung Untuk Kepentingan Daerah*, (Jakarta :Pustaka Utama Grafiti, 1992), hlm. 30

sebagai Orator. Berdasarkan tujuan berdiri, maka idealnya PUSA bergerak untuk memajukan dan memodernkan pendidikan Islam di Aceh. Akan tetapi dalam realitas, terutama setelah kongres I, organisasi ini bergerak dalam bidang politik praktis, yaitu menyatukan langkah dan pemikiran, terutama para ulama untuk melawan kolonial Belanda.

Selain itu, PUSA juga bertujuan untuk melawan penjajahan Belanda di Aceh. PUSA membentuk gerakan barisan F (*Fujiwara Kikan*) di bawah pimpinan Tgk. Syeikh Abdul Hamid Samalanga dan Sayed Abu Bakar yang membantu tentara Jepang mengusir penjajahan Belanda. Akan tetapi, setelah tentara Jepang berhasil mengusir penjajah Belanda dari daerah Aceh, tentara Jepang menangkap para pemimpin PUSA (Tgk. Muhammad Daud Beureueh, Tgk. Abdul Wahab Seulimuem, Tgk Amir Husein al-Mujahid, Tgk. M. Yunus Jamil dan lainnya) dan melarang PUSA melakukan kegiatan.

Jepang bukan hanya menangkap para pemimpinnya, tetapi juga melarang PUSA beroperasi aktif. Akibatnya segala aktivitas organisasi yang sudah dicanangkan sebelumnya terhenti total, walaupun masih ada di antara para aktivisnya yang tidak dipenjarakan. Hanya saja sejak tahun 1943, dalam rangka kemungkinan invasi Sekutu, Masubuchi (sesepuh intel F.Kikan), T.Adachi (perwira intel) dan Aoki Eigorō (pejabat kehakiman) yang tiba di Aceh dari Singapura, menyarankan kepada Gubernur Iino supaya Jepang perlu mendapat sokongan dari ulama PUSA.

Dengan demikian PUSA sampai jelang akhir masa pendudukan Jepang mulai memainkan peran penting kembali dalam percaturan politik di Aceh. Menurut Rusdi Sufi, peran ulama PUSA lebih penting setelah Indonesia merdeka, yaitu dalam mempertahankan kemerdekaan, atau dalam menghadapi revolusi fisik (1945-1950).⁴² Walaupun PUSA secara organisatoris ketika itu telah tiada, tetapi mantan fungsionaris dan anggota dari berbagai cabang organisasi inilah yang sangat berperan dalam mempertahankan kemerdekaan di Aceh. Mereka berperan dalam lasykar-lasykar rakyat

Akan tetapi, pada tahun 1943, utusan tentara Jepang membentuk kembali PUSA untuk bekerjasama dalam menjalankan politik Aceh.⁴³ Kemudian, PUSA mengadakan kongres pada tanggal 20-24 April 1940 di Kuta Blang Asan, Sigli. Kongres PUSA dihadiri oleh perwakilan dari berbagai daerah; ulama yang beraliran tradisional (ulama kaum tua) dan ulama yang beraliran modern (ulama kaum muda); kelompok pemuda yang beraliran nasionalis dan kelompok pemuda yang beraliran Islamis; para *Uleebalang* (yang anti penjajah Belanda).

Selain itu, kongres PUSA juga dihadiri oleh orang yang berasal dari luar daerah Aceh, yaitu Mahmud Yunus (berasal dari Padang) dan Encik Rahman El Junusiyah (berasal dari Padang Panjang). Kongres PUSA pertama, menghasilkan Pembentukan organisasi pemuda PUSA yang diberi nama Kasyafatul Islam

⁴² *Ibid.*, hlm. 35

⁴³ Rusdi Sufi, *Gerakan Nasionalisme di Aceh (1900-1942)*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 1998), hlm. 84

(diketuai oleh Amir Husein al-Mujahid) dan Muslimat PUSA (yang diketuai oleh Tgk. Nyak Asna dan Ny. Tgk. M. Daud Beureueh). Kedua, Membentuk Majelis Taufiziyah Syar'iyah PUSA yang bertujuan untuk mengawasi penetapan hukum dan kelangsungan PUSA (yang diketuai oleh Tgk. Hasballah Indrapuri). Dan ketiga, Pembentukan media penyiaran dan penerbitan PUSA, yaitu Majalah Penyoeleoh (dipimpin oleh Tgk. Ismail Yakob).

BAB IV

PERAN TEUNGKU HAJI ABDULLAH UJONG RIMBA SEBAGAI SYUKO HOIN PADA MAHKAMAH SYARIAH

A. Peran Abdullah Ujong Rimba dalam Menjabat sebagai Mahkamah Syariah.

Selain tugas dan eksistensi Ulee Balang, Teungku juga merupakan salah satu pilar dari elemen elit lain dalam masyarakat Aceh, sebagai orang yang memimpin dan ahli di bidang agama; orang yang menjabat pekerjaan yang berhubungan dengan agama; serta orang yang taat mengerjakan ketentuan-ketentuan agama. Mereka memperoleh gelar bukan atas dasar pengangkatan oleh sultan dan bukan pula dengan proses pewarisan. Akan tetapi ia muncul dalam peredaran sejarah sosial Aceh atas prestasi ilmu dan ketekunan belajar serta kerja di bidangnya.

Dengan perkataan lain, elit sosial muncul atas prestasi, sehingga sekaligus memperoleh pretise dari masyarakatnya. Mereka berpandangan hidupnya yang religius, maka gelar yang disandangnya merupakan gelar yang begitu mulia di kalangan masyarakat Aceh⁴⁴. Kiprah di dunia pemerintahan juga tercatat pada masa Jepang di Aceh, Abdullah Ujong Rimba disertai tugas sebagai *Atjeh Syuko Hoin* (Mahkamah Tinggi Agama Daerah Aceh).

⁴⁴ Misri A. Muchsin, *Potret Aceh dalam Bingkai Sejarah*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 69.

Kemudian, pada tanggal 1 Juli 1946 (setelah Plokamasi Kemerdekaan RI), berdasarkan profesionalisme, Abdullah Ujong Rimba diangkat menjadi ketua Mahkamah Syariah kabupaten Pidie di daerah Sigli. Ia diangkat berdasarkan SK kepala pejabat Agama Daerah Aceh tanggal 12 Agustus 1946, No, 1/P.W.A.⁴⁵ Karir yang dicapai Abdullah Ujong Rimba selama di pengadilan meningkat pesat. Hal ini ditandai dengan penetapannya pada jabatan anggota dan wakil ketua pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Aceh oleh pemerintah, dengan pangkat Penghulu Muda (D2/III) pada tanggal 1 September 1957.

Selanjutnya, Abdullah Ujong Rimba diangkat sebagai Ketua pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kutaraja (Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh), berdasarkan SK Menteri Muda Agama (3 Juni 1960 Nomor C/VI-3/3067), dengan jabatan sebagai ketua Pengadilan Tinggi Agama Tingkat I (ES/III). Kemudian ketika ia pensiun ditandai dengan SK Menteri Agama (pada tanggal 24 Mei 1971, nomor B/III-3C/2535). Sesuatu hal yang menarik dan menunjukkan semangat kerjanya yang luar biasa, setelah memasuki masa pensiun Abdullah Ujong Rimba kembali bekerja pada Pemerintah Daerah sebagai hakim agama (tidak tetap) di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banda Aceh.

Pada tahun 1968 beliau diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalam satu periode dan karenanya mendapat Bintang Maha Putra kelas III. Dalam pemilihan umum tahun 1977 dan 1982 Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba terdaftar menjadi calon anggota DPR dari Partai Golkar dan beliau

⁴⁵ Musdaruddin MS, *Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba dan Kebijaksanaan Dakwahnya di Aceh, Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah IAIN Ar- Raniry,1995), hlm. 22

terpilih, tetapi selanjutnya beliau mengundurkan diri. Pada tahun 1977 menjadi anggota MPR RI mewakili Golongan Karya.

B.Akhir kepemimpinan Abdullah Ujong Rimba

Dalam buku *Sejarah Ringkas Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh*, karya Drs. Haji Ismail Muhammadsyah (Ismuha) pada halaman pertama antara lain tertulis: dalam rangka penumpasan G.30.S di Daerah Istimewa Aceh ini, panglima kodam I Iskandarmuda selaku penguasa Perang Daerah untuk Daerah Istimewa Aceh, secara terpisah meminta pendapat berupa hukum Islam mengenai G.30.S itu kepada Teungku Abdullah Ujong Rimba ketua Mahkamah Syari'ah/Pengadilan Agama Daerah Istimewa Aceh.

Musyawarah yang dipimpin Teungku Abdullah Ujong Rimba telah mengambil keputusan-keputusan penting, yang maksudnya ajaran komunisme kufur/haram hukumnya, penganutnya yang sadar adalah kafir, pelaku G.30.S adalah kafir *harbi* yang wajib ditumpas, pembubaran PKI wajib hukumnya, orang yang menumpas G.30.S. karena Allah dan terbunuh mati syahid hukumnya. Selain dari itu, musyawarah memutuskan untuk mendirikan sebuah organisasi ulama yang diberi nama Majelis Permusyawaratan Ulama Daerah Istimewa Aceh. Untuk pertama kali terpilih Teungku Abdullah Ujong Rimba menjadi ketuanya.⁴⁶

Dengan adanya fatwa musyawarah alim ulama se Daerah Istimewa Aceh. Yang dipimpin Teungku Abdullah Ujong Rimba, maka pada tanggal 19 Desember

⁴⁶*ibid.*, hlm 152

1965 panglima kodam I Iskandar Muda mengumumkan pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi-organisasi bawahannya dalam daerah hukumnya, yaitu Daerah Istimewa Aceh. Apabila sekarang, setelah Teungku Abdullah Ujong Rimba meninggal dunia pada tanggal 11 September 1983 (4 Zulhijjah 1403 H), kita akan mengenang kembali amal perjuangan beliau, maka harus kita akui bahwa fatwa mengharamkan ajaran komunisme oleh alim ulama Aceh dibawah pimpinan beliau adalah amat penting.

Semenjak organisasi Majelis Ulama didirikan dalam bulan Desember 1965, Teungku Abdullah Ujong Rimba terus menerus menjadi ketua, sekalipun telah beberapa kali perubahan susunan pengurus. Pada awal tahun delapan puluhan, kesehatan beliau terus menerus menurun, sehingga sudah tidak memungkinkan lagi memimpin organisasi Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh yang semakin berkembang.

Karena itu, waktu pada akhir tahun 1982 terjadi perubahan personalia Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, Teungku Abdullah Ujong Rimba mendapat kedudukan yang baru, yaitu Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, sementara ketua umumnya Prof.A. Hajsmy.⁴⁷Setelah wafat Teungku Abdullah Ujong Rimba pada tanggal 11 September 1983, Aceh sudah tidak punya lagi ulama yang berusia lebih dari 70 tahun, kecuali Teungku Muhammad Daud Beureueh yang keadaan fisiknya sudah

⁴⁷*Ibid.*, hlm 153

sangat uzur. Yang masih hidup, yaitu para ulama yang usianya 70 tahun ke-
bawah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berkaitan kajian diatas, maka pada bab ini penulis merumuskan beberapa kesimpulan:

Pertama, Teungku Abdullah Ujong Rimba mempunyai Peranan penting pada masa pendudukan Jepang di Aceh. Di dunia pemerintahan juga tercatat pada masa Jepang di Aceh, Abdullah Ujong Rimba diserahi tugas sebagai *Atjeh Syuko Hoin* (Mahkamah Tinggi Agama Daerah Istimewa Aceh). Pada tahun 1968 beliau diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalam satu periode dan karenanya mendapat Bintang Maha Putra kelas III. Dalam pemilihan umum tahun 1977 dan 1982 Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba terdaftar menjadi calon anggota DPR dari Partai Golkar dan beliau terpilih, tetapi selanjutnya beliau mengundurkan diri. Pada tahun 1977 menjadi anggota MPR RI mewakili Golongan Karya.

Abdullah Ujong Rimba ulama yang memimpin masyarakat Aceh tidak hanya sebagai pemimpin Agama, tetapi juga sebagai pemimpin politik dan juga pemimpin perang ulama dalam berperang melawan penjajahan Belanda, para ulama memimpin di baris depan. Bahkan peran ulama sangat berpengaruh dalam menambah kekuatan perang untuk melawan Belanda di Aceh. Ketika Abdullah Ujong Rimba menjadi ulama, ia berbicara dan bersikap jujur dalam berbagai

kondisi, hal ini karena ia berpendidikan, sehingga hal tersebut membuat ia berpretasi dan bermatabat.

Kedua, Adapun kebijakan Abdullah Ujong Rimba yaitu ia ingin menciptakan pembaharuan dalam masyarakat, yaitu pembaharuan yang tidak terlepas dari ajaran Syariat. Abdullah Ujong Rimba dikatakan juga sebagai pembaharu sistem pendidikan (melalui surat khabar Ummul Qurra) sikap hidup dan perjuangan Abdullah Ujong Rimba sebagai penganut tarekat al-Haddadiyah.

Ketiga, Dalam bidang tasawuf, Abdullah Ujong Rimba menyimpulkan *tasawuf* sebagai ilmu yang berguna untuk memperbaiki sifat dan sikap manusia. Kemudian, *tasawuf* juga berguna untuk membersihkan diri, baik secara lahir maupun batin untuk memperoleh keridhaan Allah. Hal ini merupakan dasar pemahaman ajaran tasawuf mengenai hubungan manusia dengan pencipta. Abdullah Ujong Rimba ingin mengembalikan pemahaman dan praktik ajaran Islam sesuai dengan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Usaha Abdullah Ujong Rimba untuk memurnikan dan memperbaharui ajaran Islam yang sesuai dengan syariat di Aceh menggunakan lembaga MUI sebagai sarana yang efektif untuk menyebarkan beberapa bukunya. Kemudian, ia melibatkan sejumlah ulama besar di Aceh untuk melahirkan fatwa yang berkaitan dengan permasalahan aqidah.

B. Saran

Pada penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan maupun kesalahan dalam hal pengetikan dan isi yang terkadang dalam penjelasan masih kurang menyentuh dari pokok bahasan, disini penulis memberikan ruang untuk kritikan dan saran yang bersifat membangun.

DAFTAR PUSTAKA

A.J.Piekar, *Aceh Dan Peperangan Dengan Jepang*, diterjemahkan oleh Aboe Bakar, Banda Aceh:Pusat Dokumentasi Dan Informasi Aceh, 1977.

Abdurrahman Dudung, *Metode Penelitian Sejarah 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Azyumardi Azra, *Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci: Hijaz (Mekkahdan Madinah)*, Jakarta: Logos,1999.

Ali Hajsmy, *Ulama Aceh: Mujahid Pejuang Kemerdekaan Dan Pembangunan Tamadun Bangsa*, Jakarta: Bulan Bintang,1997.

Ali Hajsmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, Jakarta: Beuna, 1983.

Abdullah Ujong Rimba, *Hakikat Islam*, Banda Aceh: MUI Aceh, 1980.

Abdullah Ujong Rimba, *Pedoman Penolak Salik Buta*, Medan Deli: Syarikat Tapanuli, 1932.

Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.

Djamil M. Joenoes , *Riwayat Barisan F'(Fujiwara kikan) di Aceh*, Banda Aceh: Pusat Pelatihan Ilmu –Ilmu sosial Aceh, 1975.

Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945- 1965*, Bandung: Mizan, 2000.

Feth Herbert. Dkk., *Pemikiran Politik Indonesia 1945- 1965*, Jakarta: LP3ES, 1995.

Gaharu Sjamaun, *Panglima Daerah Militer 1/Iskandar Muda,Revolusibelum selesai*, Banda Aceh: Kodam Iskandar Muda, 1960.

Hamdiyah A. Latief, *Persatuan Ulama Sluruh Aceh (PUSA): Its Contribution To Educational Reforms In Aceh*, Thesis, Canada, Montreal: Institut of Islamic Studies To University, 1992.

Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI,1993.

Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak: Bertarung Untuk Kepentingan Daerah*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992.

Ismuha, *Ulama Aceh Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: CV Rajawali, 1983.

Ismail Yakub, *Gambaran Pendidikan di Aceh Sesudah Perang Aceh – Belanda Sampai sekarang*, Dalam Ismail Suny (ed), Bunga Rampai Tentang Aceh.

J.Jongejans, *Negeri dan Rakyat Aceh Dahulu Dan Sekarang*, Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.

Kern. R.A. *Atjeh Moordn*, Terj. Abubakar Aceh, *Pembunuhan Aceh*, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1985.

Kahin R. Audrey, *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990.

Misri A. Muchsin, *Dinamika Tasawuf di Aceh pada Abad ke- 20 (Kajian Sejarah, Sosial Politik, dan Keagamaan)*, Ar-Raniry Pres: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012.

Musdaruddin MS, *Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba dan Kebijakan Dakwahnya di Aceh*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry, 1995.

Poerwadarmitra, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Suracmad Winarno, *Dasar- Dasar dan Tehnik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: CV Tarsito, 1970.

Tgk.A.K.Jakobi, *Aceh Dalam Perang Mempertahankan Plokamasi Kemerdekaan 1945-1949 dan peranan teuku hamid Azwar Sebagai Pejuang*, PT Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Tim Penulis IAIN Ar-raniry, *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh*, Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2008.

Rusdi Sufi, *Gerakan Nasionalisme di Aceh (1900- 1942)*, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1998.

Zakaria Ahmad, *Sejarah Perlawanan Aceh Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2008.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan Dekan Fakultas Adab UIN Ar-Raniry tentang pengangkatan pembimbing skripsi Mahasiswa Fakultas Adab UIN Ar-Raniry
2. Daftar Riwayat Hidup
3. Lampiran dokumentasi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Penulis

Nama : YULIA
Tempat/Tgl Lahir : Mesjid Usi, 19 Agustus 1993
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas : Adab dan Humaniora
Program Studi : S1
Jurusan : Sejarah Dan Kebudayaan Islam

2. Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : Tahun Lulus 2006
Sekolah Menengah Pertama : Tahun Lulus 2009
Sekolah Menengah Atas : Tahun Lulus 2012

3. Riwayat Orang Tua

Nama Ayah : M.Jalil (alm)
Pekerjaan :
Nama Ibu : Zuraidah
Pekerjaan : Tani
Alamat : Mesjid Usi

**Judul Skripsi : Peran Teungku Abdullah Ujong Rimba Sebagai Syuko
Hoin (Mahkamah Syariah) Masa Pendudukan Jepang**





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7552922 Situs : adab.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY
Nomor : Un.08/FAH/PP.00.9/73/2016

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1989 jo, Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen serta standar Nasional Pendidikan;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 89 Tahun 1963 jo, tentang pendirian IAIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 492 Tahun 2003, Tentang Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Agama RI;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 40 Tahun 2008, tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
- Memperhatikan : 1. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor : SP DIPA : 025-04.2.423925/2015, Tanggal 14 November 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara : 1. Drs. Anwar Daud, M.Hum.
(Sebagai Pembimbing Pertama)
2. Asmanidar, M.A.
(Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing skripsi
Nama/NIM : Yulia/ 511202730
Prodi : SKI
Judul Skripsi : Peran Tengku Abdullah Ujong Rimba sebagai Syuko Hoin pada Mahkamah Syari'ah
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segalasesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.


Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Januari 2016
Dekan

Prof. Dr. H. Misri A Muchsin, M.Ag.
NIP. 19630302 199403 1 001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ketua Prodi ASK
3. Pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip

SURAT PENGAKUAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulia

Nim : 511202730

Prodi/Jurusan : S1/SKI

Judul Skripsi : Peran Teungku Abdullah Ujong Rimba sebagai Syuko
Hoin (Mahkamah Syariah) Masa Pendudukan Jepang.

Mengaku dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini adalah **ASLI** karya saya sendiri, dan jika di kemudian ditemukan pelanggaran-pelanggaran akademik dalam penulisan ini, saya bersedia diberikan sanksi akademik sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Banda Aceh, 10 Agustus 2016

Yang membuat Pengakuan



Yulia